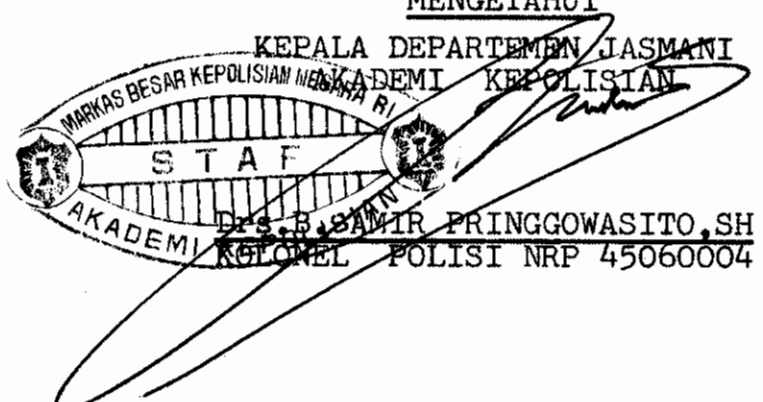


MEMASYARAKATKAN SISTEM KAMTIBMAS  
UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN

Oleh :  
Erlyn Indarti, SH,MA.

Makalah disampaikan dalam kuliah pembekalan taruna  
Akademi Kepolisian tingkat akhir, 4 Juni 1994.

MENGETAHUI  
KEPALA DEPARTEMEN JASMANI  
AKADEMI KEPOLISIAN  
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA RI  
STAF  
AKADEMI  
Drs. B. SAMIR PRINGGOWASITO, SH  
KOLONEL POLISI NRP 45060004



## **MEMASYARAKATKAN SISTEM KAMTIBMAS UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN**

---

### **I. PENDAHULUAN**

Sebagaimana diamanatkan GBHN 1993 kita menyadari bahwa "penyelenggaraan pertahanan keamanan negara yang mencakup keseluruhan daya mampu bangsa dan negara disusun, disiapkan dan dikerahkan secara terpadu dan terkendali serta didasarkan pada keyakinan akan kekuatan sendiri dan tidak kenal menyerah dan dijiwai keyakinan akan kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ditegaskan juga agar komponen kekuatan pertahanan keamanan negara perlu lebih ditata secara bertahap dan selektif terutama komponen dasar dan komponen khusus. Oleh karena itu pembangunan perlindungan masyarakat ditujukan pada terwujudnya kemampuan masyarakat dan ketahanan serta kemampuan lingkungan untuk secara swadaya aktif menanggulangi dan atau memperkecil akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh bencana alam, tindak kejahatan dan sebagainya.

Masalahnya sekarang adalah cara-cara apa saja di dalam upaya memasyarakatkan Sistem Kamtibmas Swakarsa sesuai dengan KEPERLUAN PJP II ?

### **II. SISHANKAMRATA DALAM PJP II**

Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai perwujudan upaya penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara (Hankam Negara) telah dihadirkan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara.

Bagaimana arah dan bentuk pembinaan dan pengembangan Sishankamrata dalam PJP II, akan sangat tergantung pada para anggapan dan proyeksi mengenai bentuk, sifat dan intensitas tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG) yang diperkirakan akan dihadapi bangsa Indonesia.

Globalisasi informasi yang menyuguhkan berbagai nilai paham, dan bahkan kepentingan di seluruh aspek kehidupan : ideologik politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, pada gilirannya mendorong kebutuhan untuk selalu meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia, termasuk kesiapan Sishankamrata-nya.

Benturan kepentingan yang pada tingkat tertentu dan karena sebab tertentu cenderung menampilkan potensi konflik, terutama yang terjadi di sekitar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kawasan di sekelilingnya, perlu selalu diwaspadai. Besar atau kecil, langsung atau tidak langsung, pada akhirnya akan memberi pengaruh terhadap kebutuhan pemantapan Sishankamrata.

Maraknya berbagai paham mengenai demokrasi, hak azasi dan lingkungan hidup, di satu sisi dapat memperkaya pandangan, sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan nasional di bidang-bidang tersebut. Tetapi di sisi lain, penerapan ketiga paham tersebut secara bulat-bulat dan semata-mata bertolak dari sistem nilai dan budaya yang asing bagi bangsa Indonesia, juga berpotensi memunculkan kerawanan dalam kehidupan nasional.

Selain ketiga faktor tadi, upaya pembinaan dan pengembangan Sishankamrata dipengaruhi pula oleh

berbagai faktor dinamika internal, yang justru timbul dan berkembang seiring dengan pesatnya pelaksanaan pembangunan nasional dan kemajuan tingkat kehidupan yang dihasilkan. Pluralitas bangsa dan ragam busaya yang melingkupinya, dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi titik rawan bila dihadapkan dengan berbagai perkembangan atau perubahan tadi.

Kewaspadaan terhadap hal-hal tersebut, sekali lagi menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, memang merupakan cita-cita yang perlu terus diusahakan perwujudannya dan dipelihara secara seksama. Semuanya, baik faktor-faktor luar maupun internal, merupakan kendala dan peluang yang benar-benar harus dipertimbangkan dalam upaya pembinaan dan pengembangan Sishankamrata.

Dengan memperhatikan kondisi pengelolaan Sishankamrata selama ini, maka memasuki PJP II, kebijaksanaan dan strategi pembinaan dan pengembangan Sishankamrata perlu diarahkan pada pemantapan persepsi dan apabila perlu mempertimbangkan pembenahan konsepsi yang terkandung dalam sistem tersebut. Perwujudannya, lebih diarahkan pada keserasian pendekatan kesejahteraan dan keamanan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional.

Prioritas diberikan pada upaya penjabaran dan perujudan komponen-komponen terutama Rakyat Terlatih (Komponen Dasar) dan Perlindungan Masyarakat (Komponen Khusus), dalam peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Terhadap Komponen Utama, kebijaksanaan diarahkan dan strategi dititikberatkan untuk mengujudkan ABRI yang profesional, efektif, efisien dan modern. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kemampuan

POLRI dalam rangka penanganan masalah Kamtibmas. Perhatian perlu benar-benar diberikan terhadap masalah Kamtibmas ini. Sebab, diluar aspek pertahanan, akibat dari segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang dihadapi pada umumnya akan bermuara dan tampil sebagai masalah Kamtibmas.

Peneguhan posisi, peran dan kewenangan POLRI sehingga dapat berperan secara lebih efektif, masih perlu dimantapkan dalam penjabaran konsepsi dan pelaksanaan Sishankamrata.

Dalam kerangka pembinaan dan pengembangan Komponen Pendukung, kebijaksanaan dan strategi diarahkan pada upaya peningkatan dan pemanfaatan seluruh sumber daya nasional di berbagai daerah sehingga secara efektif, efisien, dan terpadu mampu mendukung perwujudan Sishankamrata secara utuh dan menyeluruh, serta mampu mendorong interaksi yang lebih positif di antara unsur-unsur dalam komponen tadi, ataupun diantara komponen-komponen dalam sistem tersebut.

### III. PETA SITUASI KHALAYAK INDONESIA

#### A. Umum

Uraian tentang peta distribusi khalayak di Indonesia akan memudahkan kita untuk mengadakan evaluasi tentang khalayak Indonesia dari berbagai sisi : demografi, pendidikan, kota-desa dan budaya/etnis. Dari sisi inilah diketahui hingga berapa jauh Sistem Penerangan Nasional telah memenuhi keperluan masyarakat Indonesia.

Besar kecil pengaruh yang ditimbulkan media, serta efektivitas media, amat tergantung dari khalayak. Karena khalayak tumbuh dan berkembang secara dinamis, baik jumlahnya maupun kualitas daya pikirnya, mass media harus menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut.

## B. Sisi Demografi

Peta distribusi khalayak Indonesia dari sisi demografi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi.
2. Persebaran penduduk antar daerah yang kurang seimbang.
3. Kualitas kehidupan penduduk dan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan sensus 1990, penduduk Indonesia berjumlah 179.379.000 orang. Dari jumlah itu penduduk wanita 873.000 lebih banyak dari penduduk pria (50,30 % : 49,70 %). Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia menempati tempat ke empat dalam jumlah penduduk terbesar di dunia, setelah RRC, India dan Amerika Serikat.

Mengenai penyebarannya, dari 179 juta penduduk Indonesia, lebih dari 50 % (90 Juta) tinggal di pulau Jawa, yang luasnya 6,89 % dari wilayah Indonesia. Penduduk Indonesia 69,1% tinggal di daerah perkotaan. Di lihat dari sisiumur, penduduk Indonesia kelompok umur 0 - 15 tahun berjumlah 75.850.580 atau 43,29 % dari jumlah penduduk seluruhnya.

## C. Khalayak Kota dan desa

Garis-garis Besar Haluan Negara menyebut 7 azas Pembangunan Nasional. Asas ke empat adalah "Asas Adil dan Merata" yang menyatakan :

..... bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama, harus merata di semua lapisan masyarakat dan diseluruh wilayah tanah air di maan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan

dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara (TAP MPR 1993).

Asas itu antara lain menekankan pemerataan pembangunan di desa dan kota, termasuk akses informasi sebagai salah satu pranata pembangunan terpenting.

Sensus Penduduk Tahun 1990, menunjukkan 69,1 % dari seluruh penduduk Indonesia, tinggal di daerah pedesaan dan 30,9 % tinggal di wilayah perkotaan. Mengingat kondisi budaya, sosial, ekonomi dan politik kawasan pedesaan berbeda dengan kawasan perkotaan, pertimbangan ini harus diperhitungkan jikalau kita hendak berbicara mengenai sistem penerangan nasional.

Akibat proses pembangunan selama lima Pelita, komposisi penduduk pedesaan dan kota berubah secara menyolok. Pada awal Pelita I, komposisi penduduk perkotaan dan pedesaan adalah 20 % : 80 %. Komposisi ini berubah pada akhir Pelita V, menjadi 30,9 % : 69,1 %. Sementara itu berkembangnya kota-kota, karena proses industrialisasi dan perluasan, telah merubah komposisi daerah perkotaan dan pedesaan menjadi lebih besar lagi.

Proses perpindahan penduduk desa ke kota, disebut urbanisasi. Sifat perubahan perilaku dari masyarakat desa ke kota disebut urbanisme. Arus urbanisme tidak hanya terjadi karena perpindahan secara fisik penduduk desa ke kota, tapi juga bisa terwujud oleh perubahan tata hidup masyarakat desa setelah berkembangnya pendidikan dan jumlah anak-

anak terdidik, masuknya listrik, radio, televisi, kendaraan bermotor dan perangkat teknologi modern lainnya beserta organisasi yang menyertainya.

Penetrasi teknologi dan informasi ke daerah pedesaan amat besar pengaruhnya terhadap perubahan perilaku masyarakatnya. Besar kecilnya pengaruh itu amat tergantung pada kondisi setiap desa yang berbeda satu dengan lainnya. Departemen Dalam Negeri membagi kualifikasi desa di Indonesia dalam tiga kategori :

1. Desa Swadaya, desa yang penduduknya masih hidup dalam suasana adat dan belum banyak berhubungan dengan masyarakat di luar desanya. Kemampuan desa swadaya untuk membangun masih berada dalam taraf rendah.
2. Desa swakarya, desa yang sudah mampu menimbulkan sikap untuk membangun dan mempunyai kekuatan sosial untuk melaksanakan pembangunan.
3. Desa swasembada, desa yang sudah bersikap terbuka terhadap perubahan-perubahan sosial yang dibawakan oleh pembangunan, mempunyai pemerintahan desa yang mampu mengantarkan program pembangunan kepada masyarakat. Desa swasembada mempunyai sumber alam serta sumber daya manusia yang dapat dijadikan pendukung pembangunan. Kemampuan ekonominya berasal pada taraf yang tinggi.

Berbeda dengan penduduk daerah pedesaan, masyarakat daerah perkotaan lebih cepat mengadaptasi perubahan nilai-nilai sosial. Mereka mempunyai akses informasi yang lebih besar, lebih baik tingkat pendidikannya, dan lebih lengkap fasilitas komunikasinya dibanding daerah pedesaan. Sementara itu disini lain, karena hubungan antar individu secara kekeluargaan amat renggang, mereka



menjadi mudah terpengaruh oleh informasi dari luar. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan makin lama makin besar. Menurut BPS, komposisi penduduk perkotaan dan pedesaan yang sekarang situasinya adalah 39,9 % berbanding 60,1 %, akan berubah menjadi 50% : 50% pada awal abad ke 21, tujuh tahun dari sekarang dan 60% : 40% pada akhir PJP II.

#### D. Khalayak Budaya/Etnis

Mengkaji mengenai Sistem Penerangan Nasional harus memperhitungkan juga aspek budaya dan etnis Indonesia yang terdiri dari ratusan etnis yang memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan yang sangat heterogen ini menyulitkan upaya kampanye penerangan, karena masing-masing mempunyai persepsi dan interpretasi yang berbeda terhadap pesan-pesan penerangan yang disampaikan, sesuai dengan nilai budaya yang dianut. Ada tiga tingkat nilai budaya di Indonesia, kalau kita kaitkan dengan upaya perubahan dari :

1. Budaya Pro-figuratif, terdapat pada suku bangsa atau kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang masih asli dan umumnya tertutup dari pengaruh luar.
2. Budaya Ko-figuratif, suatu tahap di mana terdapat peralihan dari norma-norma tradisional oleh pengaruh dari luar.
3. Budaya Pasca figuratif, suatu tahap di mana telah terjadi pengaruh yang sangat besar hingga nilai-nilai tradisional telah berkurang atau hilang sama sekali.

Perbedaan itu menuntut pendekatan yang berbeda pula. Pada taraf Pro-figuratif misalnya, komunikasi pembangunan akan berhasilapabila

dilakukan sepenuhnya atau sebahagian besar melalui forum tatap muka.

Khalayak yang memiliki budaya Ko-figuratif, umumnya tinggal di kawasan yang telah tersentuh oleh mass media dan sarana komunikasi lainnya. Pada tingkat budaya ini komunikasi pembangunan akan efektif apabila dilakukan dalam proporsi yang sama antara komunikasi melalui mass media dan komunikasi tatap muka.

Masyarakat yang berbudaya Pasca figuratif, amat mudah dipengaruhi secara langsung oleh mass media. Khalayak kelompok ini umumnya tinggal di daerah perkotaan yang telah tersentuh oleh industrialisasi.

#### IV. P E N U T U P

##### A. Kesimpulan

Demikianlah beberapa pokok masalah yang dapat saya sampaikan dalam forum sarasehan ini dengan suatu kesimpulan bahwa "Memasyarakatkan Sistem Kamtibmas Swakarsa sesuai dengan keperluan Pembangunan dalam PJP II", antara lain dapat dilakukan melalui cara-cara :

1. Memperhatikan tantangan dan peluang pembangunan di berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam PJP II, khususnya yang berpengaruh langsung terhadap transformasi nilai-nilai sosial budaya.
2. Secara optimal memanfaatkan jalur media massa, baik media cetak maupun media eletronika.
3. Secara persuasif dan edukatif menerapkan jalur komunikasi sosial.
4. Memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari komunikasi global.

5. Di dalam implementasinya Kantibmas Swakarsa adalah sebagai sub sistem dari SISHANKAMRATA.
6. Memperhitungkan pranata dari jalur organisasi atau lembaga sosial masyarakat yang sudah ada di pedesaan.
7. Memperhatikan sasaran khalayak yang tepat agar dapat menunjang keberhasilan program Kantibmas Swakarsa.

## B. S a r a n

Mengingat keberhasilan sistem Kantibmas Swakarsa ini tergantung dari adanya partisipasi sosial (social participatiob), maka realisasinya perlu memperhatikan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Social Understanding  
Tahap memberikan pengertian-pengertian tentang pentingnya Kantibmas bagi semua pihak.
2. Social Confidence  
Lebih meyakinkan semua pihak bahwa Kantibmas adalah bagian tak terpisahkan dari kepentingan masyarakat.
3. Social Responsibility  
Bahwa masalah Kantibmas bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah ataupun POLRI semata-mata, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat secara menyeluruh.
4. Social Control  
Sistem Kantibmas disamping sebagai subyek juga sebagai obyek pembinaan yang secara terus menerus dan setiap saat senantiasa perlu menerima saran serta kritik yang sifatnya membangun.
5. Social Particiopation  
Setelah melalui keempat tahap tersebut barulah akan tercipta keikutsertaan masyarakat secara optimal terhadap Sistem Kantibmas tersebut.